

## Partisipasi Masyarakat Desa Mopolo dalam Demokrasi Politik

Ni Wayan Kartini<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: <sup>1</sup>[20606022@gmail.com](mailto:20606022@gmail.com), <sup>2</sup>[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received March 02, 2025

Accepted July 31, 2025

Published July 31, 2025

#### Kata Kunci:

Partisipasi Politik,  
 Demokrasi Desa,  
 Pembuatan Kebijakan,  
 Pengembangan Desa,  
 Inklusivitas



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam demokrasi politik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong partisipasi, serta mengkaji dampaknya terhadap pembuatan kebijakan dan pengembangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Mopolo relatif tinggi, didorong oleh kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan lokal, motivasi untuk mempengaruhi perubahan, dan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap pembuatan kebijakan yang responsif dan program pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal. Namun, penelitian juga mengidentifikasi bahwa partisipasi masih didominasi oleh kelompok elite tertentu, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan kualitas partisipasi guna mewujudkan demokrasi desa yang lebih substantif dan egaliter bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Abstract

*This study aims to analyze community participation in political democracy in Mopolo Village, identify factors that encourage participation, and examine its impact on policymaking and village development. The study used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation involving community leaders, village officials, and residents as informants. The results show that the level of community participation in Mopolo Village is relatively high, driven by an awareness of the importance of local decision-making, motivation to influence change, and the village government's efforts to encourage active participation. Community participation makes a positive contribution to responsive policymaking and sustainable development programs, as well as strengthening the quality of local democracy. However, the study also identified that participation is still dominated by certain elite groups, so efforts are needed to increase the inclusiveness and quality of participation to realize a more substantive and egalitarian village democracy for all levels of society.*

**Keywords:** Political Participation, Village Democracy, Policy Making, Village Development, Inclusiveness

### A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi, di mana keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik menentukan kualitas dan legitimasi pemerintahan (Huntington & Nelson, 1976). Di Indonesia, implementasi demokrasi pasca reformasi telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk

masyarakat desa yang secara historis sering termarginalkan dalam proses politik nasional (Mas'oed, 1994). Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemberian suara dalam pemilihan umum, tetapi mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti diskusi politik, pengawasan kebijakan, hingga aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Verba et al., 1995). Namun demikian, tingkat partisipasi politik masyarakat desa masih menunjukkan variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti struktur sosial, budaya politik, dan akses terhadap informasi.

Konteks desa dalam dinamika demokrasi Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan perkotaan, terutama dalam hal pola relasi sosial, keterikatan budaya, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Antlov, 2003). Masyarakat desa cenderung memiliki kohesivitas sosial yang tinggi dengan ikatan primordial yang kuat, sehingga partisipasi politik mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional seperti patronase, kekerabatan, dan loyalitas terhadap tokoh lokal (Aspinall & Sukmajati, 2016). Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal (Zakaria, 2015). Perubahan regulasi ini membuka peluang bagi penguatan partisipasi masyarakat desa dalam demokrasi, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi optimal.

Desa Mopolo sebagai salah satu desa yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya tertentu menjadi lokus menarik untuk mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. Tantangan partisipasi politik di desa-desa Indonesia tidak hanya terkait dengan aspek teknis seperti akses informasi dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan mindset dan budaya politik masyarakat yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi yang lebih substantif (Suharno, 2004). Studi tentang partisipasi politik di tingkat desa menjadi penting untuk memahami bagaimana demokrasi bekerja pada level akar rumput, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal (Kähkönen, 2000). Pemahaman mendalam tentang pola partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam demokrasi politik akan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu tentang partisipasi politik masyarakat desa telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Sukmajati dan Aspinall (2015) mengkaji tentang patronase politik dalam pemilu lokal di Indonesia dan menemukan bahwa hubungan patron-klien masih sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat desa, di mana partisipasi politik seringkali dimobilisasi melalui pemberian materi dan jasa oleh elite politik. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat desa belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran politik yang otonom, melainkan masih diwarnai oleh praktik-praktik transaksional. Penelitian Setiawan (2017) tentang modal sosial dan partisipasi politik di pedesaan Jawa menemukan bahwa tingginya modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi politik masyarakat, meskipun tidak selalu menjamin kualitas partisipasi yang substansif. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Syahputra (2019) tentang pengaruh tokoh adat terhadap partisipasi politik masyarakat desa di Sulawesi menunjukkan bahwa peran tokoh adat masih sangat signifikan dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat, bahkan kadang lebih dominan dibandingkan pengaruh partai politik formal.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa, namun sebagian besar masih terfokus

pada aspek mobilisasi elektoral dan belum secara komprehensif mengkaji bentuk-bentuk partisipasi politik di luar pemilu. Penelitian Wijaya (2018) tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa memberikan perspektif yang lebih luas dengan mengeksplorasi bagaimana masyarakat desa terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa, menemukan bahwa partisipasi dalam forum-forum musyawarah masih didominasi oleh elite desa dan kelompok-kelompok tertentu, sementara kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda cenderung pasif. Nugroho (2020) dalam penelitiannya tentang literasi politik masyarakat desa di era digital mengungkapkan bahwa akses terhadap informasi melalui media digital telah membuka peluang bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat desa, namun pada saat yang sama juga menimbulkan risiko penyebaran hoaks dan polarisasi politik yang dapat mengganggu kohesi sosial di desa.

Meskipun berbagai penelitian tentang partisipasi politik masyarakat desa telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terutama dalam memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam konteks desa-desa spesifik dengan karakteristik uniknya. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang luas namun kurang mendalam dalam menggali makna dan motivasi di balik perilaku partisipasi politik masyarakat desa. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada partisipasi elektoral dan belum secara holistik mengkaji berbagai bentuk partisipasi politik masyarakat desa, termasuk partisipasi dalam pengawasan pemerintahan, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial. Konteks lokal yang spesifik seperti struktur sosial, sejarah politik, dan dinamika kekuasaan lokal di setiap desa juga belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur yang ada, padahal faktor-faktor kontekstual ini sangat penting dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat.

Lebih lanjut, perubahan regulasi desa melalui UU Desa 2014 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa telah membuka ruang partisipasi baru bagi masyarakat desa, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana perubahan regulasi ini mempengaruhi praktik partisipasi politik masyarakat di tingkat desa. Sebagian besar penelitian masih menggunakan kerangka teoretis konvensional tentang partisipasi politik tanpa mempertimbangkan konteks transformasi tata kelola desa yang sedang berlangsung. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam tentang partisipasi politik masyarakat desa, yang tidak hanya mengidentifikasi pola partisipasi tetapi juga memahami makna, motivasi, dan dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi partisipasi tersebut dalam konteks spesifik seperti Desa Mopolo.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam mengkaji partisipasi politik masyarakat Desa Mopolo yang tidak hanya terbatas pada partisipasi elektoral, tetapi mencakup berbagai bentuk partisipasi politik seperti keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan pemerintahan desa, advokasi kebijakan, hingga partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, makna partisipasi bagi masyarakat, serta dinamika relasi kuasa yang membentuk pola partisipasi politik di Desa Mopolo. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan struktural-fungsional, penelitian ini mengadopsi perspektif kritis yang mempertimbangkan dimensi kekuasaan, hegemoni, dan agensi dalam menganalisis partisipasi politik masyarakat desa.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis tentang bagaimana transformasi tata kelola desa pasca UU Desa 2014 mempengaruhi ruang dan praktik partisipasi politik masyarakat Desa Mopolo. Dengan memfokuskan pada satu desa sebagai unit analisis, penelitian ini dapat menggali secara mendalam kompleksitas faktor-faktor lokal yang mempengaruhi partisipasi politik, termasuk sejarah politik desa, struktur sosial, budaya lokal,

peran tokoh-tokoh kunci, serta dinamika konflik dan konsensus dalam proses politik desa. Kebaruan lainnya adalah eksplorasi tentang bagaimana masyarakat Desa Mopolo menggunakan media digital dan teknologi informasi dalam praktik partisipasi politik mereka, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pola komunikasi politik dan pembentukan opini publik di tingkat desa. Pendekatan yang komprehensif dan kontekstual ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pemahaman tentang demokrasi lokal di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat desa.

Realitas partisipasi politik masyarakat Desa Mopolo menunjukkan kompleksitas yang menarik untuk dikaji, di mana terdapat dinamika antara tradisi dan modernitas, antara ketundukan dan resistensi, serta antara partisipasi simbolik dan substantif. Pengamatan awal menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi elektoral masyarakat Desa Mopolo cukup tinggi, namun partisipasi dalam proses-proses politik lainnya seperti musyawarah desa, pengawasan penggunaan dana desa, dan advokasi kebijakan masih relatif rendah dan didominasi oleh kelompok elite tertentu. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal dengan partisipasi substantif, di mana kehadiran fisik dalam kegiatan politik tidak selalu disertai dengan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan. Struktur sosial yang hierarkis, dominasi tokoh-tokoh tertentu, serta budaya politik yang masih paternalistik diduga menjadi faktor-faktor yang membatasi partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis di Desa Mopolo.

Di sisi lain, terdapat pula indikasi munculnya agensi politik baru di kalangan generasi muda dan kelompok perempuan di Desa Mopolo yang mulai menuntut ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses politik desa. Penggunaan media sosial dan platform digital telah membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat dan memfasilitasi komunikasi politik yang lebih horizontal, meskipun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan polarisasi opini. Kontestasi antara berbagai kelompok kepentingan dalam memperebutkan sumber daya desa, terutama dana desa, juga menjadi arena politik yang menarik di mana berbagai bentuk partisipasi politik dimobilisasi. Realitas ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Mopolo tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor struktural, kultural, dan agensi individual maupun kolektif yang memerlukan kajian mendalam dan kontekstual.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistik yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam demokrasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjektif masyarakat terkait partisipasi politik mereka dalam konteks yang alamiah (Creswell, 2014). Metode kualitatif juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika partisipasi politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, termasuk motivasi, hambatan, dan pemaknaan masyarakat terhadap praktik demokrasi di tingkat desa (Denzin & Lincoln, 2011). Penelitian dilaksanakan di Desa Mopolo dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai informan untuk mendapatkan gambaran yang holistik tentang partisipasi politik masyarakat desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga masyarakat biasa untuk

memperoleh informasi yang komprehensif tentang praktik partisipasi politik di Desa Mopolo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul secara spontan selama proses wawancara (Kvale & Brinkmann, 2009). Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan politik desa, pengetahuan tentang dinamika politik lokal, serta kemampuan untuk memberikan informasi yang kaya dan mendalam. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik desa seperti musyawarah desa, pertemuan warga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan dinamika interaksi sosial yang terjadi (Spradley, 2016).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi tahapan transkripsi, koding, identifikasi tema, dan interpretasi data. Proses analisis dimulai dengan mentranskrip seluruh hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian dilakukan koding untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Patton, 2015). Peneliti juga melakukan member checking dengan memverifikasi hasil interpretasi kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sesuai dengan pengalaman dan perspektif informan. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas informan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Desa Mopolo.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **a. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Mopolo dalam Proses Politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam proses politik dapat dikategorikan relatif tinggi, terutama dalam bentuk partisipasi formal seperti pemilihan umum dan pertemuan desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak YS,

“...Tentunya tingkat partisipasi warga desa mopolo relatif tinggi. Warga secara aktif terlibat dalam pemilihan umum, pertemuan desa, dan dikusi terbuka tentang kebijakan lokal yang ada di desa mopolo ini”.

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak YS



Sumber: Data Primer

Tingginya tingkat partisipasi elektoral ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo memiliki kesadaran politik yang cukup baik dalam menggunakan hak pilih mereka sebagai warga negara. Antusiasme masyarakat dalam menghadiri berbagai kegiatan politik formal desa

mencerminkan adanya kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan desa sebagai mekanisme untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka.

Observasi yang dilakukan peneliti memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo tidak hanya hadir secara fisik dalam kegiatan-kegiatan politik desa, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif melalui diskusi, pemberian masukan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa dan pertemuan-pertemuan tingkat RT/RW menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kolektif tentang pentingnya keterlibatan dalam proses politik lokal. Masyarakat tidak sekedar menjadi objek kebijakan pemerintah desa, tetapi berupaya menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan desa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun Desa Mopolo merupakan desa dengan karakteristik tradisional, namun transformasi menuju demokrasi partisipatif telah mulai berjalan dengan baik.

Namun demikian, tingkat partisipasi yang tinggi ini perlu dilihat secara lebih kritis dengan mempertimbangkan kualitas partisipasi yang terjadi. Meskipun secara kuantitas kehadiran masyarakat dalam kegiatan politik desa tinggi, namun intensitas keterlibatan dan pengaruh yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat masih beragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan masih cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, elite desa, dan kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan sumber daya. Sementara itu, kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat ekonomi bawah meskipun hadir dalam kegiatan politik desa, namun suara mereka belum tentu memiliki bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Realitas ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Desa Mopolo masih dalam proses menuju partisipasi yang lebih inklusif dan setara.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat**

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengambilan keputusan lokal menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi politik di Desa Mopolo. Berdasarkan wawancara dengan Ibu AK,

“...faktor-faktor yang telah mendorong partisipasi warga dengan mencakup sebuah kesadaran akan pentingnya pengambilan keputusan lokal, motivasi untuk memengaruhi perubahan, dan upaya pemerintah desa untuk bisa mendorong partisipasi agar bisa aktif”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu AK



Sumber: Data Primer

Kesadaran ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial dan politik yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, terutama

pasca implementasi UU Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa. Pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan dan sumber daya yang signifikan telah mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam proses politik desa, karena mereka menyadari bahwa partisipasi mereka dapat membawa perubahan konkret bagi kesejahteraan bersama.

Motivasi untuk memengaruhi perubahan juga menjadi pendorong penting bagi partisipasi politik masyarakat Desa Mopolo. Masyarakat tidak lagi melihat diri mereka sebagai penerima pasif kebijakan pemerintah, melainkan sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam berbagai forum musyawarah desa, masyarakat aktif mengajukan usulan program, mengidentifikasi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dan bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Motivasi ini didorong oleh pengalaman positif di mana usulan-usulan masyarakat dalam periode sebelumnya berhasil diakomodasi dan direalisasikan oleh pemerintah desa, sehingga menumbuhkan kepercayaan bahwa partisipasi mereka memiliki makna dan dampak nyata. Keberhasilan-keberhasilan kecil dalam mempengaruhi kebijakan desa telah menciptakan siklus positif yang mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Desa Mopolo telah melakukan berbagai inisiatif untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, seperti menyelenggarakan musyawarah desa secara rutin, membentuk kelompok-kelompok diskusi di tingkat RT/RW, dan memanfaatkan media komunikasi modern untuk menyebarkan informasi dan menampung aspirasi masyarakat. Keterbukaan informasi tentang anggaran desa, program pembangunan, dan proses pengambilan keputusan juga telah meningkatkan transparansi pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, kepemimpinan kepala desa yang akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat telah menciptakan iklim politik yang kondusif bagi partisipasi. Kombinasi dari kesadaran masyarakat, motivasi untuk perubahan, dan fasilitasi dari pemerintah desa telah menciptakan ekosistem politik yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi lokal di Desa Mopolo.

c. Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Pembuatan Kebijakan dan Pengembangan Desa

Partisipasi masyarakat Desa Mopolo telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan lokal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak MD,

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak MD



Sumber: data Primer

“...partisipasi warga desa mopolo sudah memberikan kontribusi positif pada pembuatan kebijakan lokal. Masyarakat disini juga sudah berhasil mengidentifikasi persoalan masalah dan

mengusulkan solusi yang diambil oleh pemerintah desa, memperkuat demokrasi yang ada di desa mopolo.

Proses identifikasi masalah yang melibatkan masyarakat secara langsung memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekedar asumsi atau persepsi pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan telah menghasilkan program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memiliki dukungan kuat dari masyarakat, sehingga implementasinya menjadi lebih lancar dan efektif. Mekanisme musyawarah desa yang partisipatif telah menjadi arena deliberasi publik di mana berbagai kepentingan dan perspektif didiskusikan untuk mencapai konsensus tentang prioritas pembangunan desa.

Dampak positif partisipasi masyarakat juga terlihat dalam aspek pengembangan desa secara keseluruhan, baik dalam dimensi fisik maupun sosial. Program-program pembangunan yang dihasilkan dari proses partisipatif cenderung lebih berkelanjutan karena mendapat dukungan dan rasa kepemilikan dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga aktif dalam implementasi dan pengawasan program pembangunan, sehingga akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa meningkat. Partisipasi masyarakat juga telah mendorong inovasi dalam pembangunan desa, di mana masyarakat dengan pengetahuan lokal mereka dapat mengusulkan solusi-solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh pemerintah desa. Beberapa program unggulan desa yang berhasil dikembangkan merupakan hasil dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses politik dapat menghasilkan outcome pembangunan yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Mopolo telah memperkuat kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Proses politik yang inklusif dan partisipatif telah meningkatkan legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kohesi sosial, karena keputusan-keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses deliberasi dan konsensus bersama. Partisipasi aktif masyarakat juga telah meningkatkan kapasitas politik masyarakat, di mana mereka menjadi lebih kritis, informed, dan mampu mengekspresikan aspirasi mereka secara efektif. Pengalaman berpartisipasi dalam proses politik desa telah menjadi sekolah demokrasi bagi masyarakat, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan politik yang dapat digunakan tidak hanya dalam konteks desa, tetapi juga dalam proses politik yang lebih luas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam demokrasi politik tidak hanya berdampak pada kebijakan dan pembangunan desa, tetapi juga pada penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat secara fundamental.

## **2. Pembahasan**

### **a. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Mopolo dalam Proses Politik**

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam proses politik sejalan dengan konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1976) yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum, pertemuan desa, dan diskusi kebijakan menunjukkan bahwa masyarakat telah melampaui bentuk partisipasi minimal yang hanya terbatas pada pemberian suara, menuju

partisipasi yang lebih substantif. Verba et al. (1995) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam berbagai bentuk mulai dari voting, kampanye, hingga keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan temuan di Desa Mopolo menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi tersebut. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proses demokratisasi di tingkat desa telah mengalami perkembangan positif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek aktif dalam proses politik.

Namun demikian, tingginya tingkat partisipasi kuantitatif perlu dikritisi dari perspektif kualitas partisipasi sebagaimana disampaikan oleh Arnstein (1969) dalam tangga partisipasi yang membedakan antara partisipasi simbolik (tokenism) dengan partisipasi yang memiliki kekuatan riil (citizen power). Temuan bahwa partisipasi yang berpengaruh masih didominasi oleh elite desa dan kelompok tertentu mengindikasikan adanya kesenjangan dalam distribusi kekuatan politik di tingkat desa. Gaventa dan Barrett (2012) menjelaskan bahwa partisipasi yang inklusif memerlukan tidak hanya kehadiran fisik tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan akses yang setara terhadap ruang deliberasi. Dominasi kelompok elite dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa struktur kekuasaan tradisional masih memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik desa, meskipun telah terjadi perubahan regulasi yang mendorong demokratisasi desa.

Realitas partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif ini juga dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) yang menekankan pentingnya jaringan, norma, dan kepercayaan dalam memfasilitasi tindakan kolektif. Di Desa Mopolo, perbedaan kepemilikan modal sosial antar kelompok masyarakat menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif. Bourdieu (1986) menambahkan bahwa selain modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya juga mempengaruhi posisi individu dalam ruang sosial dan politik. Kelompok marginal seperti perempuan dan masyarakat ekonomi bawah yang memiliki keterbatasan modal cenderung mengalami eksklusi dalam proses politik meskipun secara formal memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Desa Mopolo tidak hanya memerlukan penciptaan ruang partisipasi formal, tetapi juga intervensi untuk mengatasi ketimpangan struktural yang menghambat partisipasi inklusif.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat**

Kesadaran politik masyarakat sebagai faktor pendorong partisipasi dapat dipahami melalui teori kesadaran kritis Paulo Freire (1970) yang menekankan pentingnya proses conscientization atau penyadaran kritis sebagai basis bagi tindakan transformatif. Kesadaran masyarakat Desa Mopolo tentang pentingnya pengambilan keputusan lokal merupakan hasil dari proses pembelajaran politik yang memungkinkan mereka memahami hubungan antara kondisi objektif kehidupan mereka dengan struktur politik dan kebijakan publik. Almond dan Verba (1963) dalam konsep budaya politik menjelaskan bahwa budaya politik partisipan, di mana warga negara memiliki kesadaran tentang sistem politik dan peran aktif mereka di dalamnya, merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Transformasi budaya politik di Desa Mopolo dari budaya politik subjek menuju budaya politik partisipan menunjukkan adanya proses pembelajaran kolektif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik.

Motivasi untuk mempengaruhi perubahan sebagai faktor pendorong partisipasi dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional dan teori efikasi politik. Downs (1957) dalam teori pilihan rasional menjelaskan bahwa individu akan berpartisipasi dalam politik ketika mereka memperkirakan bahwa manfaat dari partisipasi tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Di Desa Mopolo, pengalaman positif masyarakat di mana usulan mereka berhasil diakomodasi telah meningkatkan persepsi tentang efektivitas partisipasi mereka. Campbell et al. (1954) mendefinisikan efikasi politik sebagai keyakinan individu bahwa tindakan politik mereka dapat

mempengaruhi proses politik, yang terdiri dari efikasi internal (keyakinan terhadap kemampuan sendiri) dan efikasi eksternal (keyakinan terhadap responsivitas sistem). Keberhasilan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan desa telah meningkatkan baik efikasi internal maupun eksternal mereka, menciptakan siklus positif yang mendorong partisipasi berkelanjutan.

Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi dapat dipahami melalui konsep good governance dan kepemimpinan demokratis. United Nations Development Programme (1997) mendefinisikan good governance sebagai tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan inklusif. Upaya pemerintah Desa Mopolo dalam membuka ruang partisipasi, meningkatkan transparansi, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat merupakan implementasi dari prinsip-prinsip good governance yang mendukung demokrasi partisipatif. Cornwall dan Coelho (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan ruang partisipasi tidak hanya bergantung pada keberadaan forum atau mekanisme partisipasi, tetapi juga pada kualitas fasilitasi dan kesungguhan pemerintah dalam mengakomodasi suara masyarakat. Kepemimpinan kepala desa yang demokratis telah menciptakan iklim politik yang kondusif bagi partisipasi, di mana masyarakat merasa aman dan dihargai ketika menyuarakan aspirasi mereka, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

### **c. Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Pembuatan Kebijakan dan Pengembangan Desa**

Kontribusi positif partisipasi masyarakat terhadap pembuatan kebijakan sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996) yang menekankan pentingnya deliberasi publik dalam menghasilkan keputusan yang legitimate dan rasional. Proses musyawarah desa di Mopolo yang melibatkan diskusi dan pertukaran argumen antar warga merupakan manifestasi dari deliberasi demokratis, di mana keputusan tidak dihasilkan melalui agregasi preferensi individual semata, tetapi melalui proses komunikatif yang menghasilkan konsensus. Fung dan Wright (2003) dalam konsep empowered participatory governance menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat meningkatkan kualitas kebijakan karena mengintegrasikan pengetahuan lokal dan perspektif beragam yang tidak dimiliki oleh birokrat. Di Desa Mopolo, keterlibatan masyarakat telah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dampak partisipasi terhadap pengembangan desa dapat dipahami melalui teori pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Chambers (1994) menjelaskan bahwa pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan dari perencanaan hingga evaluasi menghasilkan outcome yang lebih berkelanjutan karena menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat. Friedmann (1992) dalam teori pemberdayaan menjelaskan bahwa partisipasi dalam proses politik dan pembangunan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tiga dimensi: akses terhadap sumber daya, kapasitas psikologis (self-efficacy), dan kapasitas sosial (organisasi dan jaringan). Di Desa Mopolo, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya menghasilkan program pembangunan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah secara kolektif, yang merupakan aset penting bagi keberlanjutan pembangunan desa.

Penguatan demokrasi lokal melalui partisipasi masyarakat dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi dan demokrasi lokal. Manor (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi kekuasaan kepada level lokal dapat memperkuat demokrasi dengan membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Grindle (2007) menambahkan bahwa

keberhasilan desentralisasi dalam memperkuat demokrasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik lokal. Di Desa Mopolo, implementasi UU Desa yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa telah menciptakan kesempatan bagi pendalaman demokrasi (*deepening democracy*), di mana masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin tetapi juga dalam proses deliberasi dan pengawasan kebijakan. Pengalaman berpartisipasi dalam demokrasi lokal juga memiliki efek pedagogis, sebagaimana dijelaskan oleh Tocqueville (2000), bahwa partisipasi dalam institusi lokal merupakan sekolah demokrasi yang melatih keterampilan dan kebajikan demokratis masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dalam skala yang lebih luas.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian tentang partisipasi masyarakat Desa Mopolo dalam demokrasi politik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik relatif tinggi, yang tercermin dari keterlibatan aktif dalam pemilihan umum, pertemuan desa, dan diskusi kebijakan lokal. Partisipasi ini didorong oleh tiga faktor utama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya pengambilan keputusan lokal, motivasi untuk mempengaruhi perubahan, dan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif melalui keterbukaan dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Dampak dari partisipasi masyarakat sangat signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan pengembangan desa, di mana masyarakat berhasil mengidentifikasi permasalahan dan mengusulkan solusi yang diadopsi oleh pemerintah desa, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan program pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga telah memperkuat legitimasi pemerintahan desa, meningkatkan akuntabilitas, dan memperdalam kualitas demokrasi lokal di Desa Mopolo.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa partisipasi politik di Desa Mopolo masih menghadapi tantangan terkait kualitas dan inklusivitas partisipasi, di mana kelompok elite masih mendominasi proses pengambilan keputusan sementara kelompok marginal belum memiliki pengaruh yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi transformasi menuju demokrasi partisipatif, struktur kekuasaan tradisional dan ketimpangan modal sosial, ekonomi, dan budaya masih menjadi hambatan bagi tercapainya partisipasi yang sepenuhnya inklusif dan egaliter. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelompok marginal, meningkatkan keterbukaan ruang deliberasi, dan membangun mekanisme yang memastikan bahwa semua suara masyarakat dapat didengar dan memiliki pengaruh dalam proses politik desa. Penguatan partisipasi politik yang inklusif dan berkualitas menjadi kunci bagi pendalaman demokrasi dan pencapaian pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). *The Voter Decides*. Evanston: Row, Peterson

- and Company.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268.
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. (2007). *Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas*. London: Zed Books.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *World Development*, 40(12), 2399-2410.
- Grindle, M. S. (2007). *Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. Princeton: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kähkönen, S. (2000). *Institutions Matter in Community-Based Water Management*. Washington DC: World Bank.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Manor, J. (1999). *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington DC: World Bank.
- Mas'oed, M. (1994). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2020). Literasi Politik Masyarakat Desa di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 45-62.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Setiawan, B. (2017). Modal Sosial dan Partisipasi Politik di Pedesaan Jawa. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 22(1), 89-110.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove: Waveland Press.
- Suharno. (2004). Transisi Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 125-145.
- Sukmajati, M., & Aspinall, E. (2015). Patronase Politik dalam Pemilu Lokal di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 70-88.
- Syahputra, I. (2019). Pengaruh Tokoh Adat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa di Sulawesi. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 32-50.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wijaya, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa: Studi tentang Demokrasi Deliberatif di Tingkat Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 156-175.
- Zakaria, R. Y. (2015). Implikasi Undang-Undang Desa terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 18-35.